EVALUASI RENJA
TAHUN 2024 TRIWULAN IV

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dokumen evaluasi Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 Triwulan IV dapat terselesaikan.

Dokumen evaluasi Renja 2024 Triwulan IV ini memuat evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 sampai dengan triwulan IV serta analisis pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung periode 2019 - 2024.

Kami harap dokumen evaluasi Renja ini dapat memberi manfaat dan gambaran perkembangan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung yang diharapkan bisa dijadikan salah satu pedoman dalam pengambilan keputusan pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi terhadap laporan ini sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian dukumen evaluasi Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2024 Triwulan IV ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimaksih.

Bandar Lampung, Februari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG,

Drs. SAMSURIJAL., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670418 199203 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum..... 1
1.3 Maksud dan Tujuan 4

II. PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH ……6
2.1 Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan……..... 6
2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra……..... 12
2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dengan Renstra…….. 15
2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Renja dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)..... 16

III. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH……..... 29
3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024……..... 29
3.2 Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah (Sasaran Renstra) Triwulan IV Tahun 2024..... 39

IV. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN ……..... 41
4.1 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja 41
4.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja……..... 41
4.3 Rekomendasi Kebijakan……..... 42

V. PENUTUP 43

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan program pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan program pembangunan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman pembangunan tahunan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah. Oleh karena itu Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Triwulan IV merupakan evaluasi dari Renja yang telah disusun dan dilaksanakan pada tahun 2024 s/d Triwulan IV sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.2 Dasar Hukum

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan IV Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 499);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 491);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 500);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 s/d 2024;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Permendagri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tujuan dari evaluasi dokumen perencanaan ini adalah untuk mewujudkan hal sebagai berikut :

a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
d. Konsistensi anta RKPD dengan RPJMD; dan
e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah di tetapkan.

Berikut ini adalah maksud dan tujuan dari evaluasi Renja Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung :

1.3.1 Maksud

Maksud Evaluasi Renja Tahun 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung adalah untuk mengevalusi hasil Renja yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja yang diemban oleh seluruh aparatur dilingkup Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instasi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat agar terwujud keberhasilan pelaksanaan secara sinergi program kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi Lampung.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Evaluasi Renja Tahun 2024 ini adalah untuk melihat tingkat capaian dari realisasi Renja dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian kinerja di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam rentan waktu satu tahun dengan melihat keselarasan dan proposionalitas dalam menjabarkan Renstra sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran.

II. PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 2.1.1. Cascading Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah sampai pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INFIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Kelompok/Koperasi yang Mengurus Izin simpan pinjam	Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitasi Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam
						Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Izin Pembentukan Koperasi dan atau Pembukaan Cabang/ Kantor Koperasi	Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Pembukaan Kantor Cabang , Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatknya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah	Meningkatnya Koperasi Yang Menerapkan Peraturan Perkoperasian Yang	Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya tatakelola koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengautan tata kelola kelembagaan koperasi

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INFIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Perundang-Undangan			
						Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Koperasi Simpan pinjam Yang Menerapkan Peraturan Perkoperasian Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi Simpan pinjam Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Meningkatnya Koperasi Yang Berkatagori Sehat	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Kesehatan KSP/USP	Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Terukurnya Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Pengetahuan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Meningkat Kompetensi dan Pengetahuannya	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan	Meningkatknya Pemberdayaan dan Perlindungan	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggota	Meningkatnya Perlindungan Dan Skala Usaha	Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah,

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INFIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
			Koperasi	Usaha Koperasi	ngan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten /Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	annya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koperasi	Perlindungan Usaha	Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatkan Daya Saing Umkm Dan Menumbuhkembangkan Kewirausahaan	Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
									Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
			Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Pengembangan Usaha Bagi UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Meningkatkanya Skala Usaha Umkm	Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INFIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
											Teknologi
	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di OPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INFIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
									Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
									Penyediaan Barang Cetakan	Tersedianya Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INFIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
									dan Penggandaan	dan Penggandaan	dan Penggandaan yang Disediakan
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
									Penyediaan Bahan Material	Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
									Fasilitasi Kunjugan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

NO	SASARAN (IKU)		PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INFIKATOR PROGRAM	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2.2 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra

Dari tabel 2.2.1 dibawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, terdapat 3 sub kegiatan yang tidak ada di Renja tahun 2024 tetapi sub kegiatan tersebut ada pada Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang ada sehingga sub kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Berikut ini adalah rinciannya :

Tabel 2.2.1. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra

KODE REK						URUSAN BIDANG	RENSTRA	RENJA	KET
2.						**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR**			
2.	**17.**					**BIDANG KOPERASI DAN UKM**			
2.	**17.**	**01.**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**01.**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**02.**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**03.**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**05.**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	√	**x**	
2.	17.	01.	1.	05.	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	**x**	
2.	17.	01.	1.	05.	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	√	**X**	
2.	17.	01.	1.	05.	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	√	**X**	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**06.**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	**X**	
2.	17.	01.	1.	06.	07	Penyediaan Bahan Material	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	08	Fasilitasi Kunjugan Tamu	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**07.**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	√	**x**	
2.	17.	01.	1.	07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	**x**	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**08.**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**09.**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	
2.	**17.**	**02.**				**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	√	√	

KODE REK						URUSAN BIDANG	RENSTRA	RENJA	KET
2.	**17.**	**02.**	**1.**	**01.**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	**17.**	**02.**	**1.**	**02.**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	
2.	17.	02.	1.	02.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	
2.	**17.**	**03.**				**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	√	√	
2.	**17.**	**03.**	**1.**	**01.**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.	03.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	√	√	
2.	**17.**	**03.**	**1.**	**02.**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	
2.	17.	03.	1.	02.	02.	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotanannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	√	√	
2.	**17.**	**04.**				**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	√	√	
2.	**17.**	**04.**	**1.**	**01.**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.	03.	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	√	√	
2.	**17.**	**05.**				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	√	√	
2.	**17.**	**05.**	**1.**	**01.**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.	01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	√	√	
2.	17.	06.				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	√	√	
2.	**17.**	**06.**	**1.**	**01.**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	
2.	17.	06.	1.	01.	02.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	√	√	
2.	**17.**	**07.**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	√	√	
2.	**17.**	**07.**	**1.**	**01.**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	01.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	02.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	√	√	
2.	**17.**	**08.**				**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	√	√	
2.	**17.**	**08.**	**1.**	**01.**		**Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha**	√	√	

KODE REK						URUSAN BIDANG	RENSTRA	RENJA	KET
						Menengah			
2.	17.	08.	1.	01.	01.	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	√	√	

2.3 Perbandingan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja antara Renja dengan Renstra

Dari uraian pada poin 2.2. diatas dapat diketahui bahwa Renja APBD Perubahan tahun 2024 terdapat 8 (delapan) program dan 15 (lima belas) kegiatan serta 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Adapun rekap rincian jumlah kegiatan pada Renja tahun 2024 yang didanai melalui APBDP 2024 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan
2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
3) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
6) Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
8) Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

Jika dibandingkan dengan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung periode 2019–2024 yang terdapat 8 (delapan) program dan 17 (tujuh belas belas) kegiatan serta 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Maka pada Renja Perubahan Tahun 2024 ada 5 sub kegiatan pada Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 yang belum terakomodir dikarenakan keterbatasan dana yang ada. Sedangkan untuk target dan pagu anggaran menyesuaikan dengan pagu indikatif pada Renja Perubahan tahun 2024. Berikut adalah program yang pada

Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode 2019-2024 :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 kegiatan dan 25 sub kegiatan
2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
3) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
6) Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan
8) Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

2.4 Perbandingan Program, Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Renja dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Untuk menunjang pelaksanaan Tupoksi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi anggaran sejumlah total **Rp. 20.362.676.623,62** *(Dua puluh miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh dua rupiah)* sedangkan target PAD yang dibebankan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi sebesar **Rp. 177.140.250,00** *(Seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)* yang berasal dari UPTD Balaikop. Penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024 ini berdasarkan **Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023** Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dengan anggaran tersebut diatas direncanakan akan digunakan untuk menjalankan 8 (delapan)

program dan 17 (tujuh belas) kegiatan serta 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Berikut ini adalah tabel target PAD dan belanja operasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung T.A. 2024 :

Tabel 2.4.1. Belanja Operasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD T.A 2024

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	KET
1.	Belanja pegawai	9.943.564.532,00	Gaji dan Tunjangan
2.	Belanja barang dan jasa	10.013.729.091,62	Termasuk DAK non Fisik sebesar Rp. 4.851.677.000,00
3.	Belanja hibah	0,00	-
4.	Belanja modal	405.383.000,00	-
	TOTAL PAGU	**20.362.676.623,62**	

Untuk target penerimaan PAD yang dibebankan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp. 177.140.250,.** Berikut ini adalah rincian target penerimaan PAD pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024.

Tabel 2.4.2. Target Penerimaan PAD Pada APBD Perubahan Tahun 2024

NO	URAIAN PAD	TARGET PAD TAHUN 2022 (Rp)	KET
1.	Retribusi Daerah	177.140.250,00	UPTD BADIKLATKOP
	Jumlah	**177.140.250,00**	

Pada APBD-Perubahan Tahun 2024, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mendapatkan pengurangan pagu belanja sebesar **Rp. 938.937.606,66** *(Sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam koma enam puluh enam rupiah)* dari sebelumnya yaitu **Rp. 20.362.676.623,62** *(Dua puluh miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh dua rupiah)* sehingga total pagu anggaran belanja pada APBD Perubahan Tahun 2024 menjadi **Rp. 19.423.739.016,96** *(Sembilan belas milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam belas koma sembilan puluh enam rupiah)* yang akan digunakan untuk melaksanakan 8 (delapan) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

Untuk target penerimaan PAD yang dibebankan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD Perubahan Tahun 2023 mengalami penurunan dari target sebesar **Rp. 127.140.250,00** dari sebelumnya yaitu sebesar **Rp. 177.140.250,00** menjadi **Rp. 50.000.000,00.** Berikut ini adalah rincian target perubahan penerimaan PAD pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Berikut ini adalah rekapitulasi belanja dan target penerimaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.4.3. Target Penerimaan PAD Pada APBD Perubahan Tahun 2024

NO	URAIAN PAD	TARGET PAD SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	TARGET PAD SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (Rp.)	KET
1.	Retribusi Daerah	177.140.250,00	50.000.000,00	(127.140.250,00)	Berkurang **Rp. 127.140.250,00** (UPTD Balaikop)
	Jumlah	**177.140.250,00**	**50.000.000,00**	**(127.140.250,00)**	

Tabel 2.4.4. Belanja Operasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD Perubahan T.A 2024

NO	BELANJA	PAGU SEBELUM PERUBAHAN (MURNI) (Rp.)	PAGU SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KET
1.	Belanja pegawai	9.943.564.532,00	10.006.201.525,34	62.636.993,33	Penambahan gaji dan tunjangan pegawai termasuk cpns dan PPPK
2.	Belanja barang dan jasa	10.013.729.091,62	9.417.537.491,62	(596.191.600,00)	Termasuk DAK non Fisik dan SILPA DAK 2023
3.	Belanja hibah	0,00	0,00	0,00	Tidak ada belanja hibah
4.	Belanja modal	405.383.000,00	0,00	(405.383.000,00)	Optimalisasi Anggaran
	TOTAL PAGU	**20.362.676.623,62**	**19.423.739.016,96**	**(938.937.606,67)**	

Berikut ini adalah rincian program dan kegiatan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 Perubahan :

- **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 11.800.508.766,96 terdiri dari 8 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.913.000,00 Indikatornya adalah Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 Persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.050.000,00 indikatornya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 10 dokumen
b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 26.863.000,00 indikatornya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 11 laporan

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 10.043.701.525,34 Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10.006.201.525,34 indikatornya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 73 orang/bulan
   b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 15.000.000,00 indikatornya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 36 dokumen
   c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 7.500.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
   d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 15.000.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 17 laporan
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 22.500.000,00 Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan
b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 12.500,00 indikatornya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 0,00. Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 0 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 0,00. indikatornya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 0 orang.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 446.906.241,62. Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 16.310.400,00 indikatornya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 11.239.800,00 indikatornya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket
   c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 16.991.598,62 indikatornya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket
   d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 122.449.600,00 indikatornya Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 2 paket

e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjugan Tamu Rp. 23.040.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan

f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 256.874.843,00 indikatornya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 0,00. indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 0 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

   a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 0,00. indikatornya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 0 unit

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 777.822.000,00 indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 228.552.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan

   b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 549.270.000,00 indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 459.666.000,00 indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Sub kegiatnnya adalah sebagai berikut :

   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 205.476.000,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 215.990.000,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 16.660.000,00 indikatornya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 47 unit

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 21.540.000,00 indikatornya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit

- **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 336.887.200,00 terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 290.988.000,00 indikator Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi sebesar 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :
   a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 290.988.000,00 dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam sebanyak 20 unit usaha
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 45.899.200,00 indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau

Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya sebesar 100 persen dengan sub kegiatannya yaitu :

a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 45.899.200,00 dengan indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 20 unit usaha

III. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 134.988.000,00 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 59.988.000,00 dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
   a) Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Rp. 59.988.000,00 dengan indikatornya yaitu Jumlah Koperasi yang dilakukan pengautan tata kelola kelembagaan koperasi sebanyak 30 unit usaha
2. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 75.000.000,00 dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Ksp Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
   a) Sub kegiatan Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotanannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Rp. 75.000.000,00 dengan indikatornya yaitu

Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 30 unit usaha

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 175.000.000,00 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 175.000.000,00 indikatornya adalah Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :
   a) Sub kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Rp. 175.000.000,00 dengan indikator sub kegiatan Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan sebanyak 30 unit usaha

V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 4.953.690.000,00 Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 4.953.690.000,00 indikatornya adalah Persentase SDM Koperasi Yang Meningkat Kompetensi dan Pengetahuannya sebesar 100 persen
   a) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 4.953.690.000,00 indikatornya adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian sebanyak 722 orang.
   - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar **Rp. 4.851.677.000,00** yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
     - Pembayaran Honorarium Tenaga Pendamping K-UMK sebanyak 75 orang sebesar Rp. 2.892.720.000,00
     - Pelatihan-pelatihan bagi koperasi dan UMK sebanyak 462 orang sebesar Rp. 1.725.348.351,00
     - Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMK sebanyak 200 orang sebesar Rp. 233.608.649,00

Tabel 2.4.3. Pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD T.A 2024

NO.	NAMA PELATIHAN	LOKASI	TARGER PESERTA
1	2	3	4
I	**KEGIATAN PELATIHAN**		**462 orang**
	1 Pelatihan Perkoperasian		
	1.1 Pelatihan Pengembangan Koperasi Modren	Provinsi Lampung	35 orang
	2 Pelatihan Kewirausahaan		
	2.1 Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Kreativitas Bagi Wirausaha Pemula	Provinsi Lampung	35 orang
	3 Pelatihan Keterampian Teknis		
	3.1 Pelatihan Vocasional bidang Priwisata (Home Stay dan Tour Guide) Desa Destinasi Wisata	Provinsi Lampung	35 orang
	3.2 Pelatihan Vocasional Kreasi Produk Kriya Kearifan Lokal Bagi UMK di Desa Destinasi Wisata	Provinsi Lampung	35 orang
	3.3 Pelatihan Vocasional Bagi UMK dibidang jasa Tuor guide Pariwisata	Provinsi Lampung	35 orang
	4 Pelatihan Teknis Menahit (P3KE)		
	4.1 Pelatihan Vocasional Keterampilan Menjahit Bagi Kelompok Usaha Wanita (P3 KE)	Provinsi Lampung	35 orang
	5 Pelatihan TeknisOlahan Makanan (P3KE)		
	5.1 Pelatihan Vocasional bidang makanan dan minuman kearifan lokal (P3KE)	Provinsi Lampung	35 orang
	5.2 Pelatihan Vocasional Pengolahan makanan dan minuman Hasil Laut (P3KE)	Provinsi Lampung	35 orang
	6 Pelatihan Manaerial		
	6.1 Pelatihan Akselerasi Bagi UMK Menuju UMK Mandiri	Provinsi Lampung	35 orang
	7.1 Pelatihan Sertifikasi Berbasis Kompetensi Bagi Pengawas KSP/USP dan KSPPS / USPPS	Provinsi Lampung	35 orang
	7.2 Pelatihan Sertifikasi Berbasis Kompetensi Bagi Pengurus KSP/USP dan KSPPS / USPPS	Provinsi Lampung	35 orang
	8 Pelatihan Teknologi Infomasi		
	8.1 Pelatihan Peningkatan Akses Pemasaran Produk UMK Melalui Optimasi Marketplace	Provinsi Lampung	35 orang
	9 Pelatihan Akses dan Literasi Keuangan		
	9.1 Pelatihan managemen Keuangan Usaha UMK Berbasis Aplikasi	Provinsi Lampung	35 orang
	10 Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Untuk Konsultan PLUT		
	10.1 Pelatihan Sektifikasi Kompetensi Bagi Pendamping UMK / PLUT	Provinsi Lampung	7 orang
II	**KEGIATAN PENDAMPINAN**		**75 orang**
	1 Pendampingan Koperasi (PK2UMK)		
	1.1 Honorarium Pendamping Koperasi (PK2UMK)	Provinsi Lampung	54 orang
	2 Pendampingan UMK (PK2UMK)		
	2.1 Honorarium Pendamping Koperasi (PK2UMK)	Provinsi Lampung	21 orang
	3 Koordinator Pendampingan (PK2UMK)		
	3.1 Koordinator Pendamping Koperasi (PK2UMK)	Provinsi Lampung	1 orang
	3.2 Koordinator Pendamping UMK (PK2UMK)	Provinsi Lampung	1 orang
III	**KEGIATAN LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM (LBPH)**		
	1 Penyuluhan Hukum		**200 orang**
	1.1 Sosialisasi LBPH Terkait Teknis Sistem Pembayaran Produk Konsinyasi PUMK dengan Pihak Ketiga	Provinsi Lampung	60 orang
	1.2 Sosialisasi LBPH Terkait Hak dan Kewajiban PUMK Selaku Eksportir dan Importir	Provinsi Lampung	70 orang
	1.3 SosialisasiLBPH Terkait Kegiatan Usaha Thrifting	Provinsi Lampung	70 orang

VI. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 306.660.050,00 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 306.660.050,00 indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. 306.660.050,00 indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,

Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebanyak 35 unit usaha

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 1.141.005.000,00 terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 1.141.005.000,00 indikator kegiatannya adalah Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. 796.005.000,00 indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan target 35 unit usaha
   b) Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Rp. 345.000.000,00 indikatornya Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan sebanyak 30 orang

VIII. Program Pengembangan UMKM Rp. 575.000.000,00 terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 575.000.000,00 indikator kegiatannya adalah Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya sebanyak 100 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 575.000.000,00 dengan indikator sub kegiatannya Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi sebanyak 90 unit usaha

Dibawah ini adalah tabel perbandingan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung antara RENJA dengan APBD Tahun 2024 dan APBDP 2024.

Tabel 2.4.4. Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara RENJA Dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Perubahan

KODE REK						URUSAN BIDANG	RENJA	APBD	APBDP	KET
2.						**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR**				
2.	**17.**					**BIDANG KOPERASI DAN UKM**				
2.	**17.**	**01.**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	√	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**01.**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	01.	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**02.**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	02.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	√	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**03.**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	03.	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	√	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**05.**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	√	√	**x**	
2.	17.	01.	1.	05.	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	√	**x**	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**06.**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	07	Penyediaan Bahan Material	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	08	Fasilitasi Kunjugan Tamu	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**07.**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	√	√	**x**	
2.	17.	01.	1.	07.	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	**x**	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**08.**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	
2.	**17.**	**01.**	**1.**	**09.**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√	

KODE REK						URUSAN BIDANG	RENJA	APBD	APBDP	KET
2.	17.	01.	1.	09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	√	
2.	17.	01.	1.	09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	√	
2.	**17.**	**02.**				**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	√	√	√	
2.	**17.**	**02.**	**1.**	**01.**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	√	
2.	17.	02.	1.	01.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	√	
2.	**17.**	**02.**	**1.**	**02.**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	√	
2.	17.	02.	1.	02.	01.	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	√	√	√	
2.	**17.**	**03.**				**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	√	√	√	
2.	**17.**	**03.**	**1.**	**01.**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	√	
2.	17.	03.	1.	01.	03.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	√	√	√	
2.	**17.**	**03.**	**1.**	**02.**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	√	
2.	17.	03.	1.	02.	02.	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotanannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	√	√	√	
2.	**17.**	**04.**				**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	√	√	√	
2.	**17.**	**04.**	**1.**	**01.**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	√	
2.	17.	04.	1.	01.	03.	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	√	√	√	
2.	**17.**	**05.**				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	√	√	√	
2.	**17.**	**05.**	**1.**	**01.**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	√	
2.	17.	05.	1.	01.	01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	√	√	√	
2.	17.	06.				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	√	√	√	
2.	**17.**	**06.**	**1.**	**01.**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	√	√	√	
2.	17.	06.	1.	01.	02.	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	√	√	√	
2.	**17.**	**07.**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	√	√	√	
2.	**17.**	**07.**	**1.**	**01.**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	√	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	01.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	√	√	√	
2.	17.	07.	1.	01.	02.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	√	√	√	
2.	**17.**	**08.**				**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	√	√	√	
2.	**17.**	**08.**	**1.**	**01.**		**Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	√	√	√	
2.	17.	08.	1.	01.	01.	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	√	√	√	

III. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja perprogram tahun 2024 s/d triwulan IV. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja baik fisik maupun keuangan kegiatan tahun 2024 triwulan IV dengan realisasi kinerja fisik maupun keuangan kegiatan di tahun 2024 triwulan IV dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 triwulan IV.

Tabel 3.1.1. Persentase Capaian Anggaran Program Renja Tahun 2024 s/d Triwulan IV

NO	PROGRAM	PAGU APBD PERUBAHAN 2024 (RP)	REALISASI 31 DESEMBER 2024 (RP)	CAPAIAN (%)	SISA (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.800.508.766,96	11.136.754.226,00	94,38	663.754.540,96
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	336.887.200,00	283.407.850,00	84,13	53.479.350,00
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	134.988.000,00	134.987.000,00	100,00	1.000,00
4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	175.000.000,00	155.376.400,00	88,79	19.623.600,00
5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	4.953.690.000,00	4.789.453.610,00	96,68	164.236.390,00
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	306.660.050,00	268.678.900,00	87,61	37.981.150,00
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.141.005.000,00	1.036.811.388,00	90,87	104.193.612,00
8	Program Pengembangan UMKM	575.000.000,00	1.036.811.388,00	90,87	104.193.612,00
	TOTAL	**19.423.739.016,96**	**18.333.065.868,00**	**94,38**	**1.090.673.148,96**

Dari 8 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran sangat tingi yaitu hanya 94,38 persen. Realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi yang hampir sebesar 100 persen dan terendah ada pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar 84,13 persen.

Tabel 3.1.2. Persentase Capaian Kinerja Program Renja Tahun 2024 s/d Triwulan IV

NO	PROGRAM	TARGET (PERSEN)	REALISASI (PERSEN)	TINGKAT CAPAIAN (PERSEN)
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/3*100*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100,00	100,00
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	46,70	44,84	96,01
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	47,17	44,35	94,01
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	78,57	82,30	104,74
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	26,55	32,87	123,81
6	Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	23,58	23,81	100,95
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	0,5	0,52	103,67
8	Program Pengembangan UMKM	10,91	12,35	113.21
	RATA-RATA JUMLAH			**104,55**

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa capaian kinerja program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 triwulan IV sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan rata-rata sebesar 104,55 persen dengan capaian terendah ada pada Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 94,01 persen sedangkan capaian tertinggi ada pada Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar 123,81 persen. Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada uraian berikut (rincian terlampir).

- **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 11.800.508.766,96 terealisasi sebesar 94,38 persen terdiri dari 8 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.913.000,00 terealisasi sebesar 99,92 persen. Indikatornya adalah Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 Persen dan terealisasi 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.050.000,00 terealisasi sebesar 100 persen, indikatornya

jumlah dokumen perencanaan sebanyak 10 dokumen dan terealisasi sebesar 100 persen.

b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 26.863.000,00 terealisasi sebesar 99,85 persen, indikatornya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 11 laporan dan terealisasi sebesar 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 10.043.701.525,34 terealisasi sebesar 93,95 persen, Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10.006.201.525,34 terealisasi sebesar 93,93 persen, indikatornya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 73 orang/bulan dan terealisasi sebesar 100 persen.

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar 100 persen, indikatornya Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 36 dokumen dan terealisasi sebesar 100 persen.

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 7.500.000,00 terealisasi sebesar 99,96 persen, indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan dan terealisasi sebesar 100 persen.

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar 100 persen, indikatornya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 17 laporan dan terealisasi sebesar 100 persen

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 22.500.000,00 terealisasi sebesar 100 persen, Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
    a) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar 100 persen, indikatornya Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan dan terealisasi sebesar 100 persen.
    b) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 12.500,00 terealisasi sebesar 100 persen, indikatornya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan dan terealisasi sebesar 100 persen.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 0,00. Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 0 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
    a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 0,00. indikatornya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 0 orang (efisensi anggaran)
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 446.906.241,62. terealisasi sebesar 98,56 persen, Indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
    a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 16.310.400,00 terealisasi sebesar 100 persen, indikatornya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket terealisasi sebesar 100 persen.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 11.239.800,00 terealisasi sebesar 100 persen, indikatornya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebesar 100 persen.
c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 16.991.598,62 terealisasi sebesar 90,82 persen, indikatornya Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket terealisasi sebesar 100 persen.
d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 122.449.600,00 indikatornya terealisasi sebesar 96,18 persen, Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 2 paket terealisasi sebesar 100 persen.
e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjugan Tamu Rp. 23.040.000,00 terealisasi sebesar 100 persen, indikatornya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 100 persen.
f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 256.874.843,00 terealisasi sebesar 99,93 persen, indikatornya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 100 persen.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 0,00. indikatornya adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 0 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 0,00. indikatornya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 0 unit (efesiansi anggaran)
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 777.822.000,00 terealisasi sebesar 98,14 persen, indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen terealisasi sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 228.552.000,00 terealisasi sebesar 94,63 persen, indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 100 persen.
b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 549.270.000,00 terealisasi sebesar 99,60 persen, indikatornya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan terealisasi sebesar 100 persen.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 459.666.000,00 terealisasi sebesar 92,28 persen, indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen terealisasi sebesar 100 persen. Sub kegiatnnya adalah sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 205.476.000,00 terealisasi sebesar 96,52 persen, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit terealisasi sebesar 100 persen.
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 215.990.000,00 terealisasi sebesar 86,96 persen, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit terealisasi sebesar 100 persen.
   c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 16.660.000,00 terealisasi sebesar 100 persen, indikatornya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 47 unit terealisasi sebesar 100 persen.
   d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 21.540.000,00 terealisasi sebesar 99,07 persen, indikatornya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit terealisasi sebesar 100 persen.

- **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

II. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 336.887.200,00 terealisasi sebesar 80,92 persen. terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 290.988.000,00 terealisasi sebesar 81,62 persen. indikator Persentase Kelompok/Koperasi Yang Diberi Penyuluhan Kelembagaan dan Izin Usaha Koperasi sebesar 100 persen terealisasi sebesar 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :
   a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 290.988.000,00 terealisasi sebesar 81,62 persen dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam sebanyak 20 unit usaha terealisasi sebesar 100 persen.
2. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 45.899.200,00 terealisasi sebesar 100 persen indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya sebesar 100 persen terealisasi sebesar 100 persen dengan sub kegiatannya yaitu :
   a) Sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. Rp. 45.899.200,00 terealisasi sebesar 100 persen dengan indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan

Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 20 unit usaha terealisasi sebesar 100 persen.

III. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 134.988.000,00 terealisasi sebesar 100 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 59.988.000,00 terealisasi sebesar 100 persen dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
   a) Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Rp. 59.988.000,00 terealisasi sebesar 100 persen dengan indikatornya yaitu Jumlah Koperasi yang dilakukan pengautan tata kelola kelembagaan koperasi sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 100 persen.
2. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 75.000.000,00 terealisasi sebesar 100 persen dengan indikator kegiatannya Persentase Koperasi Ksp Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 100 persen. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu:
   a) Sub kegiatan Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotanannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Rp. 75.000.000,00 terealisasi sebesar 100 persen dengan indikatornya yaitu Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 100 persen

IV. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 88,79 persen terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 88,79 persen indikatornya adalah Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 100 persen dengan sub kegiatan yaitu :
   a) Sub kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Rp. 175.000.000,00 terealisasi sebesar 88,79 persen dengan indikator sub kegiatan Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan sebanyak 30 unit usaha terealisasi sebesar 100 persen

V. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 4.953.690.000,00 terealisasi sebesar 96,68 persen Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan Yaitu :

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 4.953.690.000,00 terealisasi sebesar 96,68 persen indikatornya adalah Persentase SDM Koperasi Yang Meningkat Kompetensi dan Pengetahuannya sebesar 100 persen terealisasi sebesar 100 persen

VI. Program Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. 306.660.050,00 terealisasi sebesar 87,61 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp. 306.660.050,00 terealisasi sebesar 87,61 persen indikator kegiatannya adalah Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Rp. 306.660.050,00 terealisasi sebesar 87,61 persen indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebanyak 35 unit usaha terealisasi sebesar 100 persen

VII. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 1.141.005.000,00 terealisasi sebesar 90,87 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Rp. 1.141.005.000,00 terealisasi sebesar 90,87 persen indikator kegiatannya adalah Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan sebanyak 100 persen terealisasi sebesar 100 persen. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp. 796.005.000,00 terealisasi sebesar 94,01 persen indikator sub kegiatannya adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan dengan target 35 unit usaha terealisasi sebesar 100 persen
   b) Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Rp. 345.000.000,00 terealisasi sebesar 83,61 persen indikatornya Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan sebanyak 30 orang terealisasi sebesar 100 persen

VIII. Program Pengembangan UMKM Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 91,76 persen terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 91,76 persen indikator kegiatannya adalah Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya sebanyak 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen. Sub kegiatannya sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Rp. 575.000.000,00 terealisasi sebesar 91,76 persen dengan indikator sub kegiatannya Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi sebanyak 90 unit usaha terealisasi sebesar 100 persen

3.2 Capaian IKU Perangkat Daerah (Sasaran Renstra) Triwulan IV Tahun 2024

Tabel 3.2.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (6/5* 100)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	1 Persentase Koperasi Yang Berkualitas	36,18	43,05 %	119 %
		1. Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	8,57	8,38 %	97,73%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran RENSTRA / IKU Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah memenuhi harapan dimana dari ke 2 indikator yaitu Persentase Koperasi Yang Berkualitas dari target 36,18 persen yang ditargetkan di tahun 2024 tercapai 43,05 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 119 persen. Untuk indikator yang kedua yaitu Persentase Usaha Kecil

Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) dari target sebesar 8,57 persen terealisasi 8,38 persen atau sebesar 97,73 persen. Hal ini sangat baik dan sudah pada jalurnya mengingat adanya efesiansi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung termasuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak yang telah bekerja keras dalam membina dan membangun koperasi dan umkm yang ada di Provinsi Lampung.

IV. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1 Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan Renja Tahun 2024 Triwulan IV dan uraian pada halaman terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam merealisasikan pelaksanaan Renja tahun 2024 s/d Triwulan IV adalah sebagai berikut :

1) Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan Renja Tahun 2024 s/d Triwulan IV capaian kinerja sudah sangat baik meskipun dalam pelaksanaannya dan realisasinya sedikit tersendat dikarenakan belum maksimalnya penyediaan dana kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan harus di tunda terlebih dahulu dan dilaksanakan pada triwulan IV.
2) Keterbatasan masalah data yang belum tersedia dengan baik terutama data UMKM sangat menghambat kinerja Dinas karena sangat sulit melakukan pembinaan jika data tidak tersedia dengan baik.

4.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tidak terlepas dari peran berbagai elemen terutama dari internal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dimana atas kerjasama semua pengawai semua kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu meskipun ada beberapa kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya.

Selain itu peran dari seluruh stakeholder yang ada serta yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka pembinaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung sehingga mendukung kinerja dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Selain itu kondisi perekonomian secara keseluruhan sudah pulih pasca pandemic Covid 19 sehingga dunia usaha mulai bersemangat lagi dimana hal ini sangat berpengaruh dengan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

4.3 Rekomendasi Kebijakan

Memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1) Sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 maka dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya agar tetap mengacu pada Renstra yang ada, sehingga kesesuaian antara Renstra, RPJMD, RKPD dan Renja dapat konsisten sesuai dengan apa yang telah di rencanakan, dengan demikian target kinerja maupun penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2) Dioptimalkan lagi penyediaan dana untuk menunjang tercapainya target kegiatan.
3) Mengupayakan penyediaan data khususnya data UMKM sehingga pembinaan lebih terarah dan tepat sasaran.
4) Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan fungsional yang berkesinambungan dan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal.

V. PENUTUP

Penyusunan dokumen evaluasi Renja tahun 2024 triwulan IV Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ini di susun sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 sampai dengan triwulan IV serta analisis pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2019 - 2024.

Dengan tersusunnya dukumen evaluasi Renja ini diharapkan dapat memberi manfaat dan gambaran perkembangan pembangunan sektor Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung yang diharapkan bisa dijadikan salah satu pedoman dalam pengambilan keputusan pembangunan ditahun-tahun berikutnya. Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi terhadap laporan ini sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

LAMPIRAN

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG
(Tabel T-C 29 Permendagri 86 Tahun 2017)

N0	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2023		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Ket	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		(10=9/8)		(11=7+9)		(12=11/6)		13	14
1	**2**	**KOPERASI DAN UKM**				**75,296,859,633**		**58,358,610,000**		**19,423,739,017**		**18,333,065,868**		**94.38**		**76,691,675,868**		**101.85**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17	**DINAS KOPERASI DAN UKM**				**75,296,859,633**		**58,358,610,000**		**19,423,739,017**		**18,333,065,868**		**94.38**		**76,691,675,868**		**101.85**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD**	**persen**	**100**	**52,596,427,633.00**	**75**	**36,372,001,488.00**	**100**	**11,800,508,766.96**	**100.00**	**11,136,754,226**	**100.00**	**94.38**	**100**	**47,508,755,714**	**100.00**	**90.33**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keselarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**810,760,800**	**75**	**392,087,150**	**100**	**49,913,000**	**100.00**	**49,872,200**	**100.00**	**99.92**	**100**	**441,959,350**	**100.00**	**54.51**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	48	620,060,000	35	297,122,550	10	23,050,000	10.00	23,049,300	100.00	100.00	45	320,171,850	93.75	51.64		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lapora Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	44	190,700,800	33	94,964,600	11	26,863,000	11.00	26,822,900	100.00	99.85	44	121,787,500	100.00	63.86		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**43,040,617,541**	**75**	**28,795,500,138**	**100**	**10,043,701,525**	**100.00**	**9,436,426,810**	**100.00**	**93.95**	**100**	**38,231,926,948**	**100.00**	**88.83**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	300	42,800,617,541	223	28,675,500,138	73	10,006,201,525	73.00	9,398,929,810	100.00	93.93	296	38,074,429,948	98.67	88.96		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	108	40,000,000	72	20,000,000	36	15,000,000	36.00	15,000,000	100.00	100.00	108	35,000,000	100.00	87.50		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	3	40,000,000	2	20,000,000	1	7,500,000	1.00	7,497,000	100.00	99.96	3	27,497,000	100.00	68.74		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	68	160,000,000	51	80,000,000	17	15,000,000	17.00	15,000,000	100.00	100.00	68	95,000,000	100.00	59.38		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**60,000,000**	**75**	**39,390,000**	**100**	**22,500,000**	**100.00**	**22,500,000**	**100.00**	**100.00**	**100**	**61,890,000**	**100.00**	**103.15**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	30,000,000	4	19,815,000	2	10,000,000	2	10,000,000	100.00	100.00	6	29,815,000	100.00	99.38		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	6	30,000,000	4	19,575,000	2	12,500,000	2	12,500,000	100.00	100.00	6	32,075,000	100.00	106.92		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung

N0	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2023		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Ket	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2.17.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**277,457,000**	**75**	**36,100,000**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**75**	**36,100,000**	**75.00**	**13.01**		
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	8	207,457,000	4	36,100,000.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	4	36,100,000	50.00	17.40		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	160	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0	-	0.00	-		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	160	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	0	-	0.00	-		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persen**	**100**	**2,273,350,592**	**75**	**1,809,676,221**	**100**	**446,906,242**	**100.00**	**440,449,793**	**100.00**	**98.56**	**100**	**2,250,126,014**	**100.00**	**98.98**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	50,000,000	3	51,956,000	1	16,310,400	1	16,310,400	100.00	100.00	4	68,266,400	100.00	136.53		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	6	65,000,000	4	59,000,000	1	11,239,800	1	11,239,800	100.00	100.00	5	70,239,800	83.33	108.06		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	60,417,892	3	46,233,200	1	16,991,599	1	15,431,500	100.00	90.82	4	61,664,700	100.00	102.06		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	paket	3	25,200,000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	0.00	-		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	7	253,444,700	5	233,175,800	2	122,449,600	2	117,740,600	100.00	96.15	7	350,916,400	100.00	138.46		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	48	155,800,000	36	110,941,000	12	23,040,000	12	23,040,000	100.00	100.00	48	133,981,000	100.00	86.00		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	48	1,663,488,000	36	1,308,370,221	12	256,874,843	12	256,687,493	100.00	99.93	48	1,565,057,714	100.00	94.08		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**persen**	**100**	**1,252,625,500**	**75**	**970,286,600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**75**	**970,286,600**	**75.00**	**77.46**		
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	70	1,252,625,500	51	970,286,600.00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	51	970,286,600	72.86	77.46		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**100**	**3,217,647,400**	**75**	**2,833,234,245**	**100**	**777,822,000**	**100.00**	**763,342,043**	**100.00**	**98.14**	**100**	**3,596,576,288**	**100.00**	**111.78**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	1,388,641,000	36	604,858,145	12	228,552,000	12	216,272,043	100.00	94.63	48	821,130,188	100.00	59.13		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48	1,829,006,400	36	2,228,376,100	12	549,270,000	12	547,070,000	100.00	99.60	48	2,775,446,100	100.00	151.75		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persen**	**100**	**1,663,968,800**	**75**	**1,495,727,134**	**100**	**459,666,000**	**100.00**	**424,163,380**	**100.00**	**92.28**	**100**	**1,919,890,514**	**100.00**	**115.38**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**

N0	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2023		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Ket	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	4	279,390,000	3	143,073,990	1	205,476,000	1	198,334,140	100.00	96.52	4	341,408,130	100.00	122.20		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	36	1,177,078,800	27	664,793,644	9	215,990,000	9	187,829,240	100.00	86.96	36	852,622,884	100.00	72.44		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	86	57,500,000	77	87,152,000	47	16,660,000	47	16,660,000	100.00	100.00	124	103,812,000	144.19	180.54		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	150,000,000	2	600,707,500	1	21,540,000	1	21,340,000	100.00	99.07	3	622,047,500	100.00	414.70		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**persen**	**46.70**	**2,902,460,000**	**37.79**	**1,844,812,950**	**46.70**	**336,887,200**	**44.84**	**283,407,850**	**96.02**	**84.13**	**44.84**	**2,128,220,800**	**96.02**	**73.32**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.02.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Koperasi Yang Diberi Fasilitasi Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**persen**	**100**	**1,369,157,000**	**75**	**970,439,950**	**100**	**290,988,000**	**100**	**237,508,650**	**100.00**	**81.62**	**100**	**1,207,948,600**	**100.00**	**88.23**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	unit usaha	48	1,369,157,000	33	970,439,950	20	290,988,000	20	237,508,650	100.00	81.62	53	1,207,948,600	110.42	88.23		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.02.1.02	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Koperasi Yang Difasilitasi Izin Pembentukan dan atau Pembukaan Cabang/Kantor Koperasinya**	**persen**	**100**	**1,533,303,000**	**75**	**874,373,000**	**100**	**45,899,200**	**100.00**	**45,899,200**	**100.00**	**100.00**	**100**	**920,272,200**	**100.00**	**60.02**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	unit usaha	60	1,533,303,000	42	874,373,000	16	45,899,200	16	45,899,200	100.00	100.00	58	920,272,200	96.67	60.02		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung

N0	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2023		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Ket	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**persen**	**47.17**	**775,599,000**	**36.96**	**590,267,907**	**47.17**	**134,988,000**	**44.35**	**134,987,000**	**94.02**	**100.00**	**44.35**	**725,254,907**	**94.02**	**93.51**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.03.1.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Koperasi Yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**persen**	**100**	**625,599,000**	**75**	**590,267,907**	**100**	**59,988,000**	**100**	**59,987,000**	**100.00**	**100.00**	**100**	**650,254,907**	**100.00**	**103.94**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.03.1.01.0001	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan Kepatuhan Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	dokumen	3	237,081,000	3	269,154,000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3	269,154,000	100.00	113.53		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.03.1.01.0002	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat Sehat Mandir Tangguh serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	unit usaha	90	238,518,000	95	321,113,907	-	-	19.00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	114	321,113,907	126.67	134.63		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan pengautan tata kelola kelembagaan koperasi	unit usaha	30	150,000,000.000	-	-	30	59,988,000.000	30	59,987,000	100.00	100.00	30	59,987,000	100.00	39.99		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.03.1.02	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Koperasi Simpan Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Diawasi Kelembagaan Dan Diperiksa Yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**persen**	**100**	**150,000,000.000**	**-**	**-**	**100**	**75,000,000.000**	**100**	**75,000,000**	**100.00**	**100.00**	**100**	**75,000,000**	**100.00**	**50.00**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotanannya lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	unit usaha	30	150,000,000.000	-	-	30	75,000,000.000	30	75,000,000	100.00	100.00	30	75,000,000	100.00	50.00		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**persen**	**78.57**	**533,039,000**	**61.63**	**411,732,217**	**78.57**	**175,000,000**	**82.30**	**155,376,400**	**104.75**	**88.79**	**82.30**	**567,108,617**	**104.75**	**106.39**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.04.1.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persentase KSP/USP Yang Dinilai Kesehatannya**	**persen**	**100**	**533,039,000**	**75**	**411,732,217**	**100**	**175,000,000**	**100.00**	**155,376,400**	**100.00**	**88.79**	**100**	**567,108,617**	**100.00**	**106.39**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**

N0	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2023		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Ket	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2.17.04.1.01.0001	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	unit usaha	90	333,039,000	97	411,732,217	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	97.00	411,732,217	107.78	123.63		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	unit usaha	30	200,000,000	-	-	30	175,000,000	30.00	155,376,400	100.00	88.79	30.00	155,376,400	100.00	77.69		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**persen**	**26.55**	**10,491,660,000**	**31.01**	**9,738,769,250**	**26.55**	**4,953,690,000**	**32.87**	**4,789,453,610**	**123.80**	**96.68**	**32.87**	**14,528,222,860**	**123.80**	**138.47**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.05.1.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persentase SDM Koperasi Yang Meningkat Kompetensi dan Pengetahuannya**	**persen**	**100**	**10,491,660,000**	**75**	**9,738,769,250**	**100**	**4,953,690,000**	**100.00**	**4,789,453,610**	**100.00**	**96.68**	**100**	**14,528,222,860**	**100.00**	**138.47**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	3,222	10,491,660,000	2,530	9,738,769,250	722	4,953,690,000	722.00	4,789,453,610	100.00	96.68	3252	14,528,222,860	100.93	138.47		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**persen**	**23.58**	**1,519,336,000**	**14.23**	**1,626,569,800**	**23.58**	**306,660,050**	**23.81**	**268,678,900**	**100.98**	**87.61**	**23.81**	**1,895,248,700**	**100.98**	**124.74**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.06.1.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Koperasi Yang Mendapat Fasilitas Pengembangan dan Perlindungan Usaha**	**persen**	**100**	**1,519,336,000**	**75**	**1,626,569,800**	**100**	**306,660,050**	**100.00**	**268,678,900**	**100.00**	**87.61**	**100**	**1,895,248,700**	**100.00**	**124.74**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.06.1.01.0001	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	unit usaha	230	1,519,336,000	115	1,626,569,800	35	306,660,050	35.00	268,678,900	100.00	87.61	150	1,895,248,700	65.22	124.74		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil**	**persen**	**0.50**	**4,912,835,000**	**0.48**	**5,694,559,588**	**0.50**	**1,141,005,000**	**0.52**	**1,036,811,388**	**104.00**	**90.87**	**0.52**	**6,731,370,976**	**104.00**	**137.02**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**

N0	Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi sampai dengan tahun2023		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian s/d Triwulan IV Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2024		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		Ket	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase UMKM dan Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan**	**persen**	**100**	**4,912,835,000**	**75**	**5,694,559,588**	**100**	**1,141,005,000**	**100.00**	**1,036,811,388**	**100.00**	**90.87**	**100**	**6,731,370,976**	**100.00**	**137.02**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	unit usaha	400	4,212,835,000	305	5,002,317,588	35	796,005,000	35.00	748,362,588	100.00	94.01	340	5,750,680,176	85.00	136.50		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	orang	60	700,000,000	30	692,242,000	30	345,000,000	30.00	288,448,800	100.00	83.61	60	980,690,800	100.00	140.10		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
	2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha**	**persen**	**10.91**	**1,565,503,000**	**7.09**	**2,079,896,800**	**10.91**	**575,000,000**	**12.35**	**527,596,494**	**113.20**	**91.76**	**12.35**	**2,607,493,294**	**113.20**	**166.56**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.08.1.01	**Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**	**Persentase Usaha Kecil Yang Difasilitasi Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran serta Jaringan Usahanya**	**persen**	**100**	**1,565,503,000**	**75**	**2,079,896,800**	**100**	**575,000,000**	**100.00**	**527,596,494**	**100.00**	**91.76**	**100**	**2,607,493,294**	**100.00**	**166.56**		**Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung**
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	unit usaha	400	1,565,503,000	375	2,079,896,800	90	575,000,000	90.00	527,596,494	100.00	91.76	465	2,607,493,294	116.25	166.56		Dinas Koperasi dan UKM Prov. Lampung
												RATA-RATA CAPAIAN KINERJA %	**93.75**	**94.38**			**101.00**	**101.85**		